

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna

¹Idris, ²Dian Herdiana, ³Iqbal Miftakhul Mujtahid

¹Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Universitas Terbuka

Article Info

Article history:

Accepted: 20 April 2022

Publish: 01 Juli 2022

Keywords:

Kolaborasi,

Pengelolaan Sampah,

Kecamatan Pulau Tiga Barat,

Kabupaten Natuna

Article Info

Article history:

Diterima: 20 April 2022

Terbit: 01 Juli 2022

ABSTRAK

Dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sehingga peran dan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah membutuhkan sinergi dari pihak pembuat kebijakan hingga pelaksana kegiatan yang ada bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis collaborative governance dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah Di Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik yang ditilik dari *Starting Condition*, *Collaborative Process*, *Facilitative Leadership* dan *Institutional design*. Selain itu, faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator financial yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Abstract

Because waste management has the potential to affect public health, the role and process of waste management need collaboration between policymakers and implementers of existing waste management efforts. The objective of this research was to evaluate and analyze collaborative governance in the district of Pulau Tiga Barat, Natuna Regency, with the goal of resolving waste management issues. This study employs a qualitative method in conjunction with a descriptive approach. Primary and secondary data sources were used in this investigation. The study's findings reveal that collaborative governance in waste management in the Pulau Tiga Barat District has been operating relatively well, as evidenced by the Starting Condition, Collaborative Process, Facilitative Leadership, and Institutional design. Additionally, the issues that impede the collaborative process are reflected in financial statistics, most notably the district of Pulau Tiga Barat's insufficient budget allocation for trash management

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Idris

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Terbuka

Email: ntxidris@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Collaborative governance merupakan konsep yang menggambarkan karakteristik kerjasama diantara ketiga pilar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keunggulan dari segi kebaruan konsep *collaborative governance* itu sendiri merupakan varian baru dalam konsep governance yang mengalami perkembangan dan perjalanan yang cukup panjang. Hasil antara dari kondisi ini terjadi selama proses kolaborasi (Taufik et al., 2021).

Proses kolaborasi antar aparat birokrasi dalam hal ini melibatkan pejabat struktural dan non struktural di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Pulau Tiga

Barat dalam membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Strategi pengelolaan sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonomi, baik di lingkungan rumah tangga maupun di lingkungan instansi/kantor/sekolah. Dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sehingga peran dan proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah membutuhkan sinergi dari pihak pembuat kebijakan hingga pelaksana kegiatan yang ada bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna diperoleh informasi bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan sampah antara lain penyimpanan, pengangkutan sampah ke TPA, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, tas dengan wadah yang dapat digunakan berulang kali dan kemasan yang digunakan untuk menggunakan tempat yang dapat digunakan berulang kali.

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan kepala desa se-Kecamatan Pulau Tiga Barat, permasalahan yang dihadapi saat ini antara lain kepadudukan, kepadatan, volume sampah, kurangnya petugas kebersihan, kurangnya anggaran, alat angkut dan TPST. Rencana kerja pengelolaan sampah sebagai arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna yang digagas oleh masing-masing kecamatan meliputi penyediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda tiga, dua petugas dan satu alat persewaan transportasi laut. Berikut ini adalah data jumlah penduduk dan besaran sampah rumah tangga yang disajikan setiap tahun di Kecamatan Pulau Tiga Barat:

Tabel 1. Jumlah Sampah Rumah Tangga dan Penduduk di Kecamatan Pulau Tiga Barat

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Sampah
1	2017	1.647	527,04 Kg
2	2018	1.649	527,68 Kg
3	2019	2.145	686,40 Kg
4	2020	2.109	674,88 Kg

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, banyaknya sampah yang diangkut setiap harinya membuat Kabupaten Natuna tidak lepas dari permasalahan sampah. Masalah tata kelola kolaboratif adalah bagaimana implementasi, pengambilan keputusan dan pengawasan juga melibatkan dialog antarmuka dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah antara masyarakat dengan PSSU tingkat desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan Collaborative governance di Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam pengelolaan sampah adalah bagaimana pelaksanaan, pengambilan keputusan dan pengawasan juga melibatkan dialog antar muka dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jumlah sampah yang dihasilkan di Indonesia masih akan mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini terlihat dari masih belum optimalnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Natuna khususnya di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan target ambisius untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Terdapat tiga poin dalam target tersebut antara lain pengurangan sampah 30 persen, pengelolaan sampah 70 persen dan penghentian secara bertahap serta pelarangan beberapa jenis plastik sekali pakai.

Permasalahan lainnya tentang volume timbulan sampah dan jumlah pengangkutan sampah adalah data jumlah volume sampah berbanding dengan pengangkutan sampah yang diukur menggunakan satuan kubik di Kecamatan Pulau Tiga Barat mengalami peningkatan yang signifikan:

Tabel 2. Jumlah Volume dan Pengangkutan Sampah

No	Tahun	Jumlah Sampah	Satuan Volume	Pengangkutan Sampah dalam Kubik
1	2017	527,04 Kg	3,3	1.739,232 m ³
2	2018	527,68 Kg	3,3	1.741,344 m ³
3	2019	686,40 Kg	3,3	2.265,120 m ³
4	2020	674,88 Kg	3,3	2.227,104 m ³

Sumber: Data BPS Kabupaten Natuna, 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna, 2021)

Tata Kelola Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Jumlah pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) meningkat dari tahun 2017 hingga 2019. Setiap kepala rumah tangga harus memilah atau memisahkan sampah di rumahnya. *Collaborative governance* (kolaborasi pemerintah) sebagai pendekatan penting dan ideal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (*qualitative-descriptive*). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya, yaitu melalui wawancara yang di lakukan oleh peneliti dengan informan. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip. laporan hasil evaluasi yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan

Peran *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat

Peran *Collaborative governance* pada pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sudah ditetapkan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat. Indikator yang diukur dalam *collaborative governance* mengacu pada teori Ansel & Gash (2007) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Starting Condition

a. Sumber Daya

Pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat dengan penerapan *collaborative governance* harus melihat kekuatan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat sangat tidak mencukupi sehingga untuk pengelolaan sampah berjalan sangat terbatas. Pernyataan yang disampaikan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan Kooiman (2003) bahwa kekuatan sumber daya adalah tantangan sosial politik. Hal ini dikarenakan keberagaman tujuan dan pemahaman masing-masing orang yang membuat kebutuhan akan sumber daya akan selalu menjadi tantangan.

Kecamatan Pulau Tiga Barat berada dalam wilayah Kabupaten Natuna yang berdasarkan geografis adalah pesisir hal ini menjadikan sumber daya sangat kurang untuk penanganan sampah sesuai dengan yang diungkapkan Bidang Pengolahan. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori Kooiman (2003) jika jumlah aktor dalam hal ini sumber daya adalah penentu dalam implementasi *cooperation* yang akan memberikan banyakan masa depan. Sehingga jika jumlah sumber daya sedikit dan terbatas akan membuat masa depan pengelolaan sampah di Kecamatan Natuna tidak maksimal.

Salah satu informan, Kasubag Umum Kecamatan Pulau Tiga Barat, menjelaskan bahwa desa minimal ada 1 orang yang mengurus sampah. Peterson

(2003) menyatakan bahwa jika keberhasilan melibatkan kebersamaan dan saling ketergantungan antara publik dan non publik. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung lama dan menyeluruh keseluruh wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Hal ini telah dilakukan juga oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga dalam membantu pemerintahan dengan membuat kelompok sadarwisata.

b. Insentif

Dalam setiap kegiatan insentif atau penghargaan sangat berguna untuk menambah motivasi bekerja hal ini juga berhubungan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pengelolaan sampah Pulau Tiga Barat melakukan kegiatan pengelolaan cukup baik karena dilihat keterbatasan sumber daya yang ada Kecamatan Pulau Tiga Barat mendapatkan beberapa penghargaan dalam pengelolaan sampah di beberapa desa. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Bersama Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat yang menyatakan bahwa salah satu desa di Kecamatan Pulau Tiga Barat pernah mendapatkan penghargaan atau insentif pada tahun 2014. Hasil yang didapatkan Kecamatan Pulau Tiga Barat sesuai dengan teori Ansell & Gash (2007) yang menyebutkan jika hasil insentif akan rendah ketika stakeholder hanya bekerja sepihak atau tidak maksimal. Hasil yang didapat ini selaras dengan masalah utama Kecamatan Pulau Tiga Bogor yaitu sumber daya.

Penghargaan yang didapat Kecamatan Pulau Tiga Barat tidak langsung di Kecamatan melainkan di Desa dan Sekolah. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama dengan masyarakat dan komunitas LSM Kecamatan Pulau Tiga Barat. Salah satu informan menyatakan bahwa hubungan yang baik antara masyarakat, LSM dan pemerintah membuat pengelolaan sampah berjalan baik. Proses kolaboratif akan menghasilkan hasil yang maksimal jika kolaborasi berjalan dengan baik sesuai dengan Ansell & Gash (2007) yang menyebutkan jika insentif atau penghargaan didapatkan jika pengambil keputusan mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik.

c. Pre-history

Pengelolaan sampah adalah hal yang sangat penting dalam kesehatan jika pengelolaan sampah tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan wabah penyakit. Keadaan penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat saat awal tidak tertangani dengan baik, hal ini dibuktikan dengan jawaban beberapa informan.

Kasubag Umum Kecamatan Pulau Tiga Barat menjelaskan bahwa memang kondisi awal belum ada penanganan sampah. Kondisi awal yang terbengkalai membuat kolaborasi dilakukan sesuai dengan pendapat Ansell & Gash (2007). Latar belakang konflik mempengaruhi proses kolaborasi sesuai dengan kepentingan pemerintah. Konflik yang dapat diredakan menjadikan kolaborasi mulai berjalan perlahan.

Kondisi ini kemudian diperbaiki dengan adanya gerakan yang dilakukan pemerintah Kecamatan dan daerah. Hal kolaborasi ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan setiap stakeholder saling bergantung dan tingkat konflik yang tinggi akan menciptakan perubahan yang maksimal. Latar belakang konflik sangat mempengaruhi dalam menjalankan proses kolaborasi termasuk di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Berdasarkan konflik tersebut gerakan ini menghasilkan perubahan.

Keresahan masyarakat terhadap sampah mengakibatkan konflik terjadi sehingga Kecamatan Pulau Tiga Barat mengambil langkah untuk pengangkutan sampah sehingga konflik yang ada dapat teratasi. Menurut salah satu informan yang berasal dari komunitas LSM, konflik yang terjadi saat awal di Kecamatan Pulau Tiga Barat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemerintahan yang menangani pengelolaan sampah. Hal ini sesuai dengan teori Ansell & Gash (2007) yang menyebutkan jika konflik adalah langkah awal dalam proses collaborative governance, semakin tinggi konflik yang ada semakin kuat insentif yang bisa diciptakan.

2. Collaborative Process

a. Dialog antar muka

Dalam proses *collaborative government* adanya dialog antar muka dari beberapa pihak untuk mempercepat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Hal ini didukung dari pernyataan Camat Pulau Tiga Barat yang menyatakan bahwa tahapan dialog langsung sangat diperlukan pada kolaborasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ansell dan Gash (2007) yang menyatakan dialog langsung penting karena dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi antar lembaga baik formal dan non formal.

Dialog yang dilakukan Kecamatan sudah berlangsung dan dapat dipertahankan. Dialog tersebut berlangsung di Desa dan Kecamatan dengan petugas sampah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Menurut salah satu informan di Bidang Pengelolaan, dialog tersebut juga dilakukan di DLH Kabupaten Natuna dengan sektor lebih luas lagi. Proses diskusi pengelolaan sampah yang dilakukan sudah sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Dalam proses tersebut tidak hanya berlangsung satu arah melainkan dua arah karena saling berinteraksi. Pertemuan-pertemuan dilakukan untuk mensukseskan penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pertemuan tidak dilakukan hanya di ruangan rapat melainkan menyeluruh ke media.

Pertemuan dengan beberapa pihak dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pertemuan lainnya dilakukan oleh masyarakat dan komunitas LSM guna menciptakan pengelolaan sampah lebih baik di Kecamatan Pulau Tiga Barat, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh informan dari komunitas LSM. Hasil pertemuan ini dirasakan oleh semua pihak karena kondisi pengelolaan sampah mulai membaik di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Berdasarkan penjelasan informan yang menjalin kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukakan Meier dan O'Toole Jr (2002) yang menjelaskan keberhasilan program ditekankan dengan proses kerjasama antar organisasi yang membutuhkan kolaborasi.

b. Membangun kepercayaan

Dalam proses *collaborative governance* tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang harus dibentuk oleh pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat kepada masyarakat dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan sampah semakin baik dan tidak menimbulkan konflik masa depan. Kasubag Umum Kecamatan Pulau Tiga Barat juga menerangkan bahwa membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahan bisa dilakukan dimana saja sepanjang semua pihak yakin. Kepercayaan adalah hal penting dalam proses kolaborasi sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan maksimal. Kepercayaan dibentuk dengan tanpa paksaan dan kesesuaian setiap pihak.

Berdasarkan Kepala Bidang Pengelolaan setempat diketahui kepercayaan yang dibangun oleh pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat ke masyarakat, lembaga dan petugas di bangun melalui pendekatan dari mulai sosialisasi, pemberian pemahaman dengan pentingnya kesehatan dan pengelolaan sampah. Proses ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menyebutkan keterbukaan untuk mengeksplasi keuntungan semua pihak. Kegiatan pemberian masukan ini sebaiknya dijalankan secara menyeluruh.

Kepercayaan yang dibangun pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dengan cara pemenuhan aturan yang dibuat dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga Barat. Selain itu masyarakat dan LSM juga ikut memberikan saran dan masukan untuk Kecamatan Pulau Tiga Barat sehingga pengelolaan sampah akan lebih baik lagi. dibuktikan dengan kesiapan fasilitas rumah sakit yang semakin membaik dan siap menangani kejadian COVID-19.

c. Komitmen pada proses

Proses *collaborative government* harus disertai dengan komitmen yang kuat pada prosesnya sehingga semua hal yang dibangun akan semakin terlaksana dengan baik dan semakin kuat. Kepala Bidang Pengendalian Sampah menyatakan komitmen Pemerintah Kecamatan adalah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Natuna (Dinas Lingkungan Hidup) selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya pengelolaan sampah. Komitmen yang dilakukan masyarakat dan pemerintahan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Ansell dan Gash (2007) menyebutkan jika komitmen antar lembaga memiliki tanggung jawab bersama dalam proses dan disepakati musyawarah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup menambahkan bahwa Komitmen yang ada di Kecamatan Pulau Tiga Barat didasari dari Dinas Kabupaten Natuna yang menjalankan komitmen baik dengan masyarakat maupun swasta guna meningkatkan pengelolaan sampah. Komitmen yang diterapkan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat sesuai dengan teori yang dipakai oleh Ansell dan Gash (2007) yaitu komitmen stakeholder yang terlibat memiliki tanggung jawab bersama terhadap prosesnya dan disepakati bersama dalam musyawarah.

d. Pemahaman Bersama

Kecamatan Pulau Tiga Barat memberikan pemahaman kepada pihak diluar guna menjalankan *Collaborative government*. Hal ini dibuktikan dari DLH Kabupaten Natuna yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki Perda nomor 03 tahun 2015 tentang persampahan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup pernah melakukan sosialisasi pada pihak Kecamatan. Pemahaman bersama dalam menyatukan persepsi antara masyarakat dan pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan daerah. Ansell dan Gash (2007) memberikan pemahaman yaitu sebagai misi dan tujuan yang jelas dan arah yang jelas untuk keberlangsungan kolaborasi. Pemahaman bersama memberikan tujuan dan masalah yang memberikan masalah untuk keberlangsungan proses kolaborasi.

Penanganan pengelolaan sampah di kecamatan Pulau Tiga Barat berpegang pada perda nomor 03 tahun 2015. Perda tersebut kemudian disosialisasikan dengan baik ke masyarakat sehingga masyarakat dapat paham pentingnya pengelolaan sampah. Sosialisasi yang dirasakan oleh masyarakat adalah mekanisme pengelolaan sampah, sehingga masyarakat dapat menerapkan dan menjalankan dari rumah. Pemahaman yang dilakukan Kecamatan Pulau Tiga Barat sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yaitu pemahaman bersama adalah misi bersama, tujuan bersama, tujuan yang jelas atau arah yang jelas.

e. Dampak sementara

Semua proses yang dilakukan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Pulau Tiga Barat yang menyatakan bahwa masyarakat sudah mulai sadar bahwa dengan tidak membuang sampah di laut masyarakat sudah mulai merasakan bahwa ikan-ikan laut sudah mulai berada di pesisir pantai. Masyarakat memberikan hasil yang menunjukkan perubahan setelah sosialisasi. Kegiatan ini menunjukkan dampak yang sangat baik untuk kolaborasi di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Dampak yang baik adalah contoh keberhasilan yang ditunjukkan dalam proses kolaborasi.

Kepuasan masyarakat dalam pengelolaan sampah memberikan dampak yang baik untuk proses kolaborasi Kecamatan Pulau Tiga Barat. Ansell dan Gash (2007) sudah memberikan kriteria yang merupakan dampak yang tujuan adalah penentu keberhasilan pemimpin dalam kolaborasi. Selain itu informan-informan juga menyatakan dampak yang dirasakan semakin baik karena Kecamatan Pulau Tiga Besar menjadi lebih bersih baik di jalanan, pantai, dan lingkungan sekitar.

Keberhasilan Pulau Tiga Besar adalah capaian yang besar sebagai hasil dari proses *collaborative government*.

3. Facilitative Leadership

a. Sarana dan prasarana

Collaborative governance yang dilakukan memerlukan sarana dan prasana untuk menunjang keberlangsungan semua proses untuk memberikan Kecamatan Pulau Tiga Barat semakin baik. Kasubag Umum Kecamatan Pulau Tiga Barat menjelaskan bahwa sarana dan prasana yang diberikan kepada masyarakat berupa tong sampah. Fasilitas yang diberikan oleh kepala kasubag umum Kecamatan Pulau Tiga Barat sangat sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Fasilitas ini sangat berguna untuk masyarakat dan lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat sangat dirasakan oleh semua pihak baik masyarakat umum maupun LSM. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan sampah baik rumah tangga dan lingkungan. Kecamatan Pulau Tiga Barat menjalankan pemberian sarana dan prasana untuk masyarakat sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) sehingga dapat meningkatkan peran dan pihak dari setiap substansi hal ini akan mendukung keefektifan *stakeholder* dalam *collaborative governance*.

b. Kebijakan pemimpin

Kebijakan pemimpin dalam *collaborative governance* diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat. Pengaruh seorang pemimpin dalam membentuk kebijakan sangat penting untuk keberlangsungan kolaborasi. Sesuai dengan teori Peterson (2003) yang menyebutkan kebijakan dari pemimpin harus dipahami dan kuat di wilayahnya. Kebijakan ini sudah berlaku di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Masyarakat merasakan peran pemimpin dalam hal ini Camat memberikan pengaruh sangat besar karena setiap pertemuan memberikan himbauan untuk menjaga lingkungan di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Hasil wawancara dengan masyarakat umum menjelaskan jika Camat, lurah/kades sudah mengkoordinir seluruh bawahan untuk membantu penanggulangan sampah hal ini sesuai dengan teori jika pemimpin bersama-sama akan memberikan semangat kolaboratif. Semangat ini akan memberikan hasil lebih baik untuk lingkungan yang ditempati.

4. Institutional Design

a. Partisipasi

Partisipasi yang dilakukan dari beberapa pihak sangat membantu dalam proses *collaborative government*. Dalam wawancara, Kasi Pemerintahan Kecamatan menyatakan partisipasi yang diberikan adalah mengajak masyarakat untuk melakukan gotong royong, Jumat bersih dan kegiatan pada hari lingkungan hidup. Pengurangan hambatan adalah hal utama dalam proses kolaborasi hal ini ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat sesuai dengan teori Suharyanto (2005) dalam tahapan pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan harus konsisten dan berlangsung lama sehingga kolaborasi menghasilkan maksimal. Pemberdayaan atau partisipasi masyarakat ini berlangsung harus atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Selain itu, Kecamatan dan DLH memberikan partisipasi dengan memberikan informasi terkait pengelolaan sampah dan turut serta ikut menjaga lingkungan dengan melakukan gotong royong. Menurut informan, kesadaran masyarakat memang belum maksimal tetapi tidak menghilangkan peran masyarakat yang sudah ikut berkolaborasi. Pemberdayaan yang dilakukan masyarakat sesuai dengan teori Suharyanto (2005), pemerintah dapat mengurangi hambatan atau kendala saat partisipasi masyarakat dilakukan.

b. Peranan pihak eksternal

Pihak eksternal yang berkolaborasi dalam penerapan pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat dijelaskan oleh salah satu informan dalam Bidang Pengolahan yang menyatakan bahwa kolaborasi yang mengikutsertakan kerjasama eksternal telah berjalan lebih baik walaupun maksimal.

Pemerintah mengakui belum maksimalnya proses kerjasama dengan swasta hal ini menyebabkan pengelolaan sampah belum mencapai target. Namun hal ini sudah menjadi awal baik dalam kolaborasi. Hal ini sesuai dengan teori Strauss (2002) yang menjelaskan konteks kerjasama internal dan eksternal sangat penting bagi kolaborasi. Kerja sama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna dengan pihak swasta harus menyebar ke seluruh wilayah agar lebih terlihat proses dan hasilnya.

c. Aturan dan kebijakan

Kebijakan dan aturan diterapkan untuk *Collaborative governance* dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat telah diamanatkan pada Perda nomor 3 tahun 2015. Kolaborasi akan berjalan dengan sukses dibantu dengan aturan atau kebijakan yang berlaku. Peraturan daerah yang dimiliki Kabupaten Natuna untuk seluruh wilayah sesuai dengan teori Suharyanto (2005) tentang keselarasan dan keterpaduan antara kebijakan dan faktor lainnya. Dengan kebijakan maka proses kolaborasi akan berjalan terarah dan mempunyai panduan.

Namun peraturan tersebut belum diberlakukan maksimal dilingkungan masyarakat. Kegiatan yang seharusnya di terapkan masyarakat belum maksimal melakukannya seperti yang dijelaskan salah satu informan yang menjelaskan implemtasi belum pernah ada.yang berjalan dengan baik dan hanya terdapat himbauan dari Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat contohnya adalah kegiatan Jumaat bersih dan tidak membuang sampah sembarangan. Peraturan yang ada dan jelas serta konsisten untuk diterapkan menyakinkan para *stakeholder* untuk menerapkan *collaborative governance*, selain itu pemerintah akan memberikan intruksi yang merata dan terbuka sehingga hasil yang memuaskan akan benar-benar terwujud.

Faktor-Faktor Penghambat *Collaborative governance* Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat

1. Financial

Dalam proses kegiatan anggaran sangatlah penting untuk dapat berjalan suatu kegiatan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara, informan dalam Bidang Pengelolaan, menjelaskan bahwa anggaran yang disediakan sudah ada, namun belum mencukupi. Anggaran adalah hal penting dalam sebuah kegiatan termasuk dalam proses kolaborasi sesuai dengan teori Suharyanto (2005). Keserasian dan keterpaduan antara kebijakan harus sepadan dengan anggaran yang diterima. Anggaran yang besar dan kebijakan yang diterapkan akan mensukseskan proses kolaborasi namun akan sebaliknya jika anggaran lebih kecil.

Anggaran pengelolaan sampah dari DLH ke Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah tersedia namun tidak mencukupi hal ini dikarenakan pandemic COVID 19 yang menyebabkan keterlambatan penyebaran dan terjadi devisit. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh satu informan selaku masyarakat setempat. Keterbatasan anggaran yang disalurkan dari DLH ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007) yang menyebutkan proses *collaborative governance* akan mengalami keterbatasan anggaran.

2. Situasi Krisis

Menurut Kasi Pemerintahan Kecamatan, situasi kritis sangatlah mengkhawatirkan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya ini menjadi situasi yang mengkhawatirkan dalam proses kolaborasi. Berdasarkan teori Ansell & Gash (2007) *stakeholder* dalam hal ini pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat harus mempunyai kapasitas dan kekuatan dalam bernegosiasi.

Kesulitan yang dialami oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat yakni rehatang pulau-pulau. Informan menyatakan bahwa hal ini tidak memungkinkan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengambil sampah di setiap kecamatan dan tidak pernah mendapat dana alokasi khusus tentang persampahan dari pemerintah pusat. Keadaan yang disebutkan Bidang Pengolahan sesuai dengan teori yang disebutkan di kekuatan dan kepercayaan adalah pendekatan teori adalah tahapan dalam membantu kolaborasi. Kekurangan dana yang dialami DLH membuat proses kolaborasi terhambat. Proses tersebut harus tetap berjalan walaupun banyak hambatan dengan meminta bantuan dengan masyarakat.

Menurut salah informan wakil dari masyarakat menyatakan bahwa masyarakat juga banyak yang belum paham akan pentingnya menjaga lingkungan. Kecamatan Pulau Tiga Barat masih terlihat adanya penumpukan sampah walaupun tidak seperti saat awal. Sesuai dengan teori Chris dan Vangen (1996) seharusnya pemerintah mengajak masyarakat untuk berdemokrasi dan berbicara walaupun hanya perwakilan sehingga proses akan berjalan lebih lancar. Proses kolaborasi ini akan berjalan lama sampai pemerintahan mendapatkan anggaran tetap.

Kendala lainnya yang dirasakan Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah opini masyarakat yang akan berdampak signifikan ke lingkungan, menurut Camat Pulau Tiga Barat. Masalah yang dihadapi Kecamatan Pulau Tiga Barat berawal dari kekurangan sumber daya yang terbatas sehingga terjadi keterlambatan pengangkutan sampah. Hal ini sesuai dengan pendapat Chris (1996) yang mengatakan jika proses kolaborasi akan dilator belakangi oleh ketergantungan dan hal ini adalah keterbatasan sumber daya. Kecamatan harus bergerak cepat untuk meningkatkan sumber daya agar tidak terjadi permasalahan antar masyarakat dan pemerintahan kembali.

3. Kepentingan politik

Birokrasi yang baik akan menghasilkan kegiatan yang baik, sejalan dengan *collaborative government* yang dijalankan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat. Hal ini diungkapkan oleh Camat Pulau Tiga Barat. Keberhasilan program kolaborasi membutuhkan kontrol formal sesuai teori yang disampaikan Meier dan O'Toole Jr (2002). Setiap organisasi dan lembaga atau kelompok lain di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah saling berkondinasi dengan baik hal ini dapat membantu keberhasilan proses kolaborasi di Kecamatan ini. Hal tersebut harus dipertahankan untuk menciptakan kolaborasi yang maksimal dan berkualitas

Kontribusi masyarakat dalam penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat terlihat dari beberapa lingkungan yang mulai tertata dan tidak ada penumpukan sampah. Hal tersebut harus ditingkatkan seiring dengan berjalannya proses kolaborasi dan keikutsertaan pihak luar. Pernyataan yang disampaikan Masyarakat sedikit berbeda dengan pernyataan Camat Kecamatan Pulau Tiga Barat. Sesuai dengan pernyataan tersebut sebaiknya pemerintah harus memaksimalkan birokrasi agar tidak menyipang. Birokrasi yang dilakukan harus sesuai dengan Teori yang disampaikan Meier dan O'Toole Jr sehingga kolaborasi berjalan dengan maksimal. Kolaborasi formal dan non formal harus berjalan beriringan.

Tujuan dari penetapan *collaborative government* yaitu pengelolaan sampah lebih baik dan berjalan maksimal. Namun adanya hambatan mengakibatkan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat harapan. Camat Pulau Tiga Barat menjelaskan bahwa harapan Pemerintah Kecamatan Pulau Tiga Barat kepada Pemerintah Daerah yakni agar dapat memaksimalkan petugas-petugas yang ada, sarana dan prasarana yang ada serta dibangunnya TPS 3R di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Tujuan adalah hal yang harus dicapai setiap perjalanan kolaborasi, Tujuan yang diungkapkan oleh Camat Pulau Tiga Barat untuk memaksimalkan sumberdaya baik manusia dan sarana adalah hal utama dalam meningkatkan penanganan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat sudah berjalan cukup baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Starting Condition*: masih terdapat pelaksanaan yang belum efektif baik dari sisi komunikasi dan penanganan di awal-awal terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat akibat dampak pengelolaan sampah yang kurang baik.
2. *Collaborative Process*: sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah Camat Pulau Tiga Barat ataupun pihak LSM, komunitas lainnya dan masyarakat. Namun, peran pihak swasta belum diperoleh maksimal.
3. *Facilitative Leadership*: sudah dilakukan dengan baik salah satunya dengan penerbitan edaran secara berkala terhadap pengelolaan sampah.
4. *Institutional design*: masih adanya kekurangan bantuan materil dan peranan LSM dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. Faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator financial yaitu masih terbatasnya pengalokasian anggaran untuk pengelolaan sampah di Kecamatan Pulau Tiga Barat. Selain itu indikator pada opini masyarakat yang masih belum diberikan pemahaman tentang pentingnya sosialisasi pengelolaan sampah dan kerja sama pemerintah dengan pihak lainnya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang berkecimpung membantu menyelesaikan penelitian ini kepada Ketua UPBJJ Batam beserta seluruh jajarannya. Kedua pembimbing Saya Bapak Dr. Dian Herdiana, S.IP., M.AP dan Bapak Dr. Iqbal Miftakhul Mujtahid, S.IP., M.Si yang tanpa henti memberikan saran serta semangat sehingga penulisan karya ilmiah ini selesai. Selain itu, ucapan terima kasih ini juga Saya dedikasikan untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan serta semua pihak yang sudah mendukung penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative governance* in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna. (2021). *Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna*. Natuna: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
- Bupati Natuna. *Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabuapten Natuna*. , (2015).
- Kooiman, J. (2003). Societal governance. In *Demokratien in Europa* (pp. 229–250). Springer.
- Meier, K. J., & O’Toole Jr, L. J. (2002). Public management and organizational performance: The effect of managerial quality. *Journal of Policy Analysis and Management: The Journal of the Association for Public Policy Analysis and Management*, 21(4), 629–643.
- Peterson, J. (2003). “*Policy Networks*.” Austria: Institut für höhere Studien.
- Strauss, D. (2002). How to make collaboration work. *California: Publisher, Date*.
- Suharyanto. (2005). *Administrasi Publik: Entrepreneurship, Kemitraan dan Reinventing Government*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Taufik, M., Mujtahid, I. M., & Nugroho, R. A. (2021). Structural Collaboration Process, Staff and Non-Civil Servant in Job Seeker Card Service (AK-1). *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 11(2), 121–129. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5408>